

Perang Cumbok dan Gerakan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) di Aceh (Desember 1945 Maret 1946)

Abstrak

Komunisme pernah menjadi aliran politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tiga peristiwa Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 kembali mempertajam polarisasi elit Aceh yang telah berlangsung lama yaitu antara golongan ulama dan uleebalang. Kelompok ulama terutama yang tergabung dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) mendukung kemerdekaan Republik Indonesia sedangkan uleebalang terutama yang merasa diuntungkan pada masa kolonial Belanda mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda. Kelompok Ulama dan Uleebalang terlibat persaingan untuk mendapatkan senjata dari Jepang yang telah menyerah kepada sekutu. Sekelompok uleebalang di Pidie mendirikan Markas Uleebalang yang sepek terjangnya yang provokatif dianggap anti-Republik. Konflik ulama-uleebalang mencapai klimaksnya pada awal Januari 1946 dengan peristiwa yang di Aceh dikenal sebagai Perang Cumbok. Perang Cumbok berakhir dengan kekalahan di pihak uleebalang. Banyak uleebalang yang terbunuh dalam Perang Cumbok. Tidak berhenti pada pembersihan uleebalang yang terlibat dalam Markas Uleebalang saja, kemudian terjadi pula pembersihan terhadap uleebalang yang tidak terlibat dalam Markas Uleebalang dan bahkan kepada uleebalang yang sebenarnya dikenal pro-Republik oleh organisasi yang dibentuk oleh kelompok pro-ulama PUSA yaitu Tentara Perjuangan Rakyat (TPR

Oleh: Kurniawati (Dosen Jurusan Sejarah UNJ)

Menyerahnya Jepang kepada, sekutu telah menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat Indonesia. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana itu pun dirasakan di Aceh. Rakyat Aceh pada umumnya gembira dengan berita kekalahan Jepang karena menganggap itu sebagai permulaan yang baik dan selanjutnya mereka akan hidup seperti zaman sebelum perang yang cukup pangan dan sandang.¹ Tersiar kabar ketika itu bahwa sejumlah *uleebalang* telah membentuk *Comite van Ontvangst* (Panitia Penyambutan) Belanda.² Pihak *uleebalang* ini juga telah mulai mengumpulkan nama nama orang yang dianggap kolaborator Jepang.³ Pada pertengahan September 1945, berita proklamasi kemerdekaan RI tersebar luas di Aceh.⁴ Rakyat Aceh

menanggapi berita ini dengan beragam.

Mereka yang mengharap kedatangan kembali Belanda merasa kecewa, sedang mereka yang berperan. Sikap ini sekali lagi mempertajam polarisasi golongan dalam masyarakat Aceh karena golongan yang pertama kebanyakan berasal dari golongan *uleebalang*, sedang yang terakhir kebanyakan berasal dari ulama ditambah sedikit *uleebalang* yang memang sejak awal sudah pro Republik. Keadaan ini tak pelak lagi menimbulkan suasana saling curiga dalam masyarakat Aceh. Pada awal bulan Oktober, Mr. T. M. Hasan yang baru saja diangkat sebagai gubernur Sumatra mengumumkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mulai resmi dijalankan di Pulau Sumatra. Selanjutnya Aceh ditetapkan menjadi suatu keresidenan. Pada tingkat keresiden, komite itu disebut Pusat Komite Nasional yang dipimpin oleh PODA (Pemimpin Oemoem Daerah Aceh) yang dijabat Teuku Nyak Arif Komite Nasional Daerah Aceh beranggotakan 65 orang yang ditunjuk berdasarkan pencalonan

¹ T. Alibasyah Talsya, *Sedjarah dan Dokumen dokumen Pemberontakan di Aceh*, (Jakarta:Penerbit Kesuma, tt), h. 4.

² Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945 1949*, (Jakarta:UI Press, 1998), h. 78.

³ Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, (Jakarta: Archapada, 1950), hh. 6 7.

⁴ S.M. Amin, *Kenang kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 129.

partai partai.⁵ Dari 65 orang tersebut yang merupakan golongan PUSA maupun orang-orang yang bersimpati pada PUSA berjumlah 17 orang. Sisanya 41 orang berasal dari golongan non PUSA dan 5 orang diangkat menjadi bupati dari 5 kabupaten di Aceh.⁶

Pembentukan Komite Nasional Daerah Aceh ini disusul dengan pengangkatan residen sampai bupati. Terpilih sebagai residen adalah Teuku Nyak Arif, sedangkan *uleebalang* lainnya dipilih sebagai bupati.⁷ Gubernur kemudian mengangkat Teungku M. Daud Beureueh diangkat sebagai Pimpinan Jawatan Agama di Kutaraja. Teuku Nyak Arif lebih dari siapa pun di Aceh memiliki hubungan luas dengan tokoh-tokoh nasionalis dari daerah lainnya di Indonesia di samping pengalamannya yang juga banyak dalam pemerintahan. Penunjukan Teuku Nyak Arif sebagai residen Aceh memang di satu pihak adalah keputusan yang tepat dan strategis dilihat dari kepentingan nasional, mengingat reputasinya sebagai nasionalis sudah teruji selama masa kolonial Belanda dan Jepang. Namun di pihak lain, latar belakang Teuku Nyak Arif yang berasal dari *uleebalang* tentu tidak dapat dinafikan begitu saja oleh sebagian masyarakat Aceh terutama dari golongan non-*uleebalang* ketika itu. Banyak pihak terutama pemuda yang berasal dari golongan ulama sudah lama menaruh curiga terhadap Teuku Nyak Arif. Hal ini berawal dari sikap Teuku Nyak Arif yang pernah merahasiakan kegiatan-kegiatan awal Komite Nasional Daerah tanpa mereka ketahui alasannya sehingga mereka menghubungkannya dengan *Comite van Onvangst* seperti yang dilakukan *uleebalang* lain ataupun *Intercross* (*International Red Cross*) yang netral.⁸

Kecurigaan terhadap Teuku Nyak Arif ini makin besar dengan kedatangan M.J. Knottenbelt pada tanggal 5 Oktober 1945 ke Aceh.

⁵ *Ibid.*, h.35

⁶ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), h. 163.

⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op. Cit.*, h. 85. ⁹ *Ibid.*, h. 86.

⁸ *Ibid.*, h. 82

Mayor M.J. Knottenbelt adalah seorang wakil sekutu yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban Jepang dalam pemeliharaan keamanan dan pengamanan persenjataan pasukannya. Belakangan diketahui bahwa Knottenbelt adalah seorang Belanda, bahkan merupakan bagian dari ADCS (*Anglo Dutch Country Section*) force 136.⁹

Masyarakat Aceh terutama dari golongan ulama mencurigai ada hubungan tak wajar antara Teuku Nyak Arif dengan Knottenbelt setelah pertemuannya dengan wakil sekutu ini yang disaksikan oleh perwakilan Jepang Masabuchi, Ketua Komite Nasional Daerah Tuanku Mahmud, sejumlah tokoh PUSA, dan orang kepercayaan Teuku Nyak Arif, Goh Moh Wan.¹⁰ Pada pertemuan pertama yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945 itu memang tidak ada alasan untuk mencurigai Teuku Nyak Arif karena ketika itu dengan jelas ia menyatakan ketidaksukaannya kepada Belanda meskipun tetap bersedia untuk bekerjasama dengan sekutu.¹¹ Namun beberapa saat kemudian segera tersebar identitas asli Knottenbelt yang berkebangsaan Belanda sehingga timbul berbagai aksi pemuda yang menentang kehadiran Knottenbelt dengan cara penempelan plakat dan unjuk rasa.¹²

Situasi yang memanas memaksa Knottenbelt pergi dari Aceh pada tanggal 10 November 1945, tetapi sebelum itu Knottenbelt mengangkat Goh Moh Wan sebagai petugas penghubung sekutu (*Allied Liaison Officer*) untuk Aceh yang kemudian ditindaklanjuti Teuku Nyak Arif dengan memberikan surat pengakuan pada Goh Moh Wan sebagai

⁹ *Ibid.*, h.89. ADCS adalah sebuah seksi dalam pasukan 136 yang dibentuk di Kolombo pada permulaan 1945, di bawah komando panglima tertinggi sekutu Asia Tenggara Laksamana Lord Luis Mountbatten. Seksi ini sebagaimana namanya (*Anglo-Dutch*) terdiri dari tentara Inggris dan Belanda yang bertugas menyusup ke daerah-daerah musuh mencari informasi dan mengadakan kontak-kontak dengan penduduk pro-Inggris atau Belanda untuk kepentingan sekutu dengan sasaran Jepang di Malaya maupun Sumatra.

¹⁰ *Op., Cit.*, hh. 89-90.

¹¹ M. Nur El Ibrahimy (1996), *Op., Cit.*, h.11

¹² *Ibid.*, h.13

penghubung sekutu. Di sinilah kemudian timbul kecurigaan pemuda terutama dari golongan ulama terhadap Teuku Nyak Arif. Goh Moh Wan adalah seorang Cina yang ketika zaman Belanda menjadi sekretaris Perhimpunan Dagang Cina tetapi pada zaman pendudukan Jepang menjadi penerjemah bagi *Kenpetai* Jepang yang tugasnya antara lain mencatat orang-orang yang harus ditangkap terutama orang-orang Cina yang notabene adalah bangsanya sendiri.¹³ Bagi kelompok ulama, kebijakan Teuku Nyak Arif ini merupakan tanda tanya besar dan tentu akhirnya menimbulkan spekulasi adanya hubungan Teuku Nyak Arif dengan Belanda karena bagi mereka tidak ada alasan bagi Teuku Nyak Arif untuk memilih orang dengan bakat oportunistis seperti Goh Moh Wan untuk menjadi orang kepercayaan, apalagi sebagian orang Cina di Medan saat itu bergabung dengan *Poh An Tui*, organisasi yang pro Belanda sehingga tidak mustahil Goh Moh Wan yang kerap bepergian ke Medan masuk pula dalam organisasi ini.¹⁴

Sikap Teuku Nyak Arif ini kemungkinan diambil berdasarkan situasi yang berkembang di Aceh saat itu di mana semangat anti asing terutama Belanda kembali intens. Sementara di lain pihak situasi saling curiga antara kubu ulama-*uleebalang* semakin meningkat sehingga Teuku Nyak Arif ingin mempertahankan Knottenbelt sebagai pihak ketiga untuk menjadi kekuatan penyeimbang dan memakai Goh Moh Wan-seorang etnis Cina yang minoritas yang tidak mempunyai kepentingan dalam perseteruan ulama-*uleebalang* sehingga diharapkan akan bersikap netral.

¹³ *Ibid.*, h.15

¹⁴ *Ibid.*, 40 tahun setelah melewati berbagai proses pencaharian pada tahun 1985 M.Nur El Ibrahimy menemukan dokumen yang berasal dari *Public Record Office* London berupa *Daily Situation Report* tanggal 12 November 1945 yang antara lain berisi petisi empat orang penandatanganannya yaitu T.Nyak Arif, Kho Moh Wan (Go Moh Wan), Habib M.Al Habsyi, dan Goesmia. Isi petisi ini adalah permintaan kepada sekutu untuk mempertahankan kehadiran Mayor Knottenbelt di Aceh, *Lihat Ibid* h.74

Pada tanggal 12 Oktober 1945, Residen Teuku Nyak Arif meresmikan Angkatan Pemuda Indonesia menjadi pasukan resmi negara yang berarti API diresmikan menjadi TKR untuk Aceh. Sebelumnya API adalah organisasi paramiliter yang berdiri sejak 27 Agustus 1945 di bawah pimpinan Sjamaun Gaharu.¹⁵ Penunjukan API sebagai pasukan resmi negara mengecewakan golongan ulama karena anggota API kebanyakan berasal dari eks perwira *giyugun* yang notabene kebanyakan dari *uleebalang*.¹⁶ Oleh karena itu, para pemuda yang berorientasi pada ulama membentuk Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) pada tanggal 4 Oktober 1945, dan dua hari kemudian diubah menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI) yang kemudian berganti lagi menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI).¹⁷

Dengan adanya API yang merupakan organisasi militer Republik yang resmi dan PRI yang *diback up* ulama PUSA yang populis, timbul perebutan pengaruh di antara mereka dan persaingan untuk menjadi satu-satunya pasukan militer Republik yang "resmi" di Aceh sehingga ketika API diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) maka PRI diubah menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).¹⁸

Persaingan antara API(TKR) dan PRI(Pesindo) pertama-tama dapat dilihat dari struktur organisasi masing-masing. Sengaja atau tidak, PRI (Pesindo) pun menamakan perwakilannya di setiap daerah dengan WMD. Namun singkatan itu bukanlah Wakil Markas Daerah seperti yang dimaksud API, melainkan Wakil Majelis Daerah.¹⁹ Dibandingkan

¹⁵ Ramadhan KH, Hamid Jabbar, *Sjamaun Gaharu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h.162

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, h.155

¹⁸ Nama Pesindo mengikuti organisasi yang sama yang berdiri di Surabaya pada 10 Nopember 1945. Pesindo merupakan fusi dari API Jakarta, Gerpri Yogyakarta, AMRI Semarang, PRI Surabaya, Angkatan Muda Kereta Api, Angkatan Muda Gas dan Listrik, dan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon. *Lihat* Ben Anderson, *Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hh. 281-283

¹⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op., Cit.*, h.110

dengan API (TKR), PRI (Pesindo) lebih mengakar ke bawah sehingga lebih mudah meluaskan jaringan lebih-lebih setelah mereka menguasai koran dan radio ex-Jepang.²⁰ Persaingan lain yang lebih sengit terjadi dalam hal yang lebih vital yaitu perebutan senjata Jepang.²¹ TKR antara lain berhasil melakukan perampasan di Bireun dan Seulimeum setelah sebelumnya berhasil mendapat 600 pucuk senjata api yang didapat Teuku Nyak Arif seusai bertemu dengan residen Jepang di Aceh Mayor Jenderal Shazaburo Lino.²² Sedangkan Pesindo berhasil merebut senjata dalam jumlah besar lewat suatu serangan ke pusat perbekalan senjata Jepang di Lhok Nga, daerah pesisir di Kutaraja.²³

Sementara itu di tengah pro-kontra dalam masyarakat Aceh mengenai kemerdekaan Indonesia, ulama-ulama terkemuka di Aceh mengadakan pertemuan pada tanggal 15 Oktober 1945 di Kutaraja yang berakhir dengan dikeluarkannya "Maklumat Ulama Seluruh Aceh". Maklumat yang ditandatangani oleh Teungku M. Daud Beureueh dan Teungku H. Ahmad Hasballah Indrapuri berisi fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin, dan gangguan dari mana pun datangnya harus dihadapi dengan perang sabil. Selanjutnya dikatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kelanjutan perjuangan dari Teungku Cik di Tiro dan pahlawan-pahlawan lain dan kepada seluruh rakyat diminta tunduk dan patuh kepada segala perintah pemimpin untuk keselamatan tanah air, agama, dan bangsa.²⁴

Maklumat ulama ini menambah semangat rakyat Aceh untuk mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan kemungkinan masuknya kembali Belanda. Untuk itu, meskipun

terdapat persaingan pengaruh antara PRI dan TKR, tidak terjadi bentrokan antara keduanya karena menghadapi musuh bersama. Namun hal ini dikacaukan dengan suatu perkembangannya yang terjadi di Pidie, di mana *uleebalang-uleebalangnya* menunjukkan gerakan yang berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya.

Meletusnya Perang Cumbok Di Pidie, sebagian besar *uleebalang* dengan terang terangan menentang kemerdekaan Indonesia. Abdullah Arif seorang wartawan *Semangat Merdeka* mengatakan bahwa ketika ia datang ke Lammeulo, Teuku Cumbok *uleebalang* daerah tersebut bersikap " ...ragu ragu dan memandang lech kepada gerakan untuk membela kemerdekaan tanah air kita Indonesia...."²⁵ Lebih lanjut lagi Teuku Daud Cumbok melarang pengibaran bendera merah putih ketika sekelompok orang melakukannya di depan kantor gunco Lammeulo pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada tanggal 22 Oktober 1945, seluruh *uleebalang* Pidie kecuali Teuku Bentara Pineung berkumpul di rumah Teuku Umar Keumangan di Beureunun.²⁶ Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas situasi Aceh dan bagaimana posisi mereka tentunya di masa selanjutnya.. Pertemuan ini berakhir dengan keputusan untuk membangun "Markas *Uleebalang*"²⁷.

Keputusan untuk mendirikan Markas *Uleebalang* ini merupakan sikap yang reaksioner. Suasana tidak menentu, harapan yang besar akan datangnya kembali Belanda, dan tidak kalah pentingnya yaitu semakin banyaknya rakyat yang bergabung dengan organisasi paramiliter pro PUSA seperti PRI, Barisan Hisbullah, maupun Barisan Mujahidin. Hal terakhir ini tampaknya cukup

¹ *Ibid.*, h.112.

² Aceh merupakan tempat penyimpanan persenjataan Jepang terbesar dan terlengkap di Sumatera. Lihat Tgk. A.L Jacobi, *Op. Cit.*, h.139.

³ *Ibid.*, 138

⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op., Cit.*, h.117

⁵ Ramadhan K.H, Hamid Jabbar, *Op., Cit.*, h.130

²⁵ Abdullah Arif, *Di Sekitar Peristiwa Penghianat Tjoembok*, (Kutaraja:Semangat Merdeka, 1946), h.5

²⁶ S.M. Amin, *op. Cit.*, h. 13 2. Teuku Bentara Pineung adalah ayahanda dari Teuku M. Hasan, gubernur Sumatra pertama.

²⁷ *Ibid.*, h.6

mengganggu *uleebalang--uleebalang* karena kuatnya golongan ulama PUSA dapat dianggap sebagai ancaman mengingat hubungan mereka di masa lalu sehingga meskipun kini ulama dan *uleebalang* secara formal sama sama pro Republik (karena *uleebalang* pun diangkat sebagai wedana di daerah masing masing oleh residen Aceh), tetapi *uleebalang* ini tetap merasa perlu untuk memobilisasi diri.

Perkembangan ini mernbuat kedua belah pihak berusaha untuk menguasai senjata senjata ex Jepang sebanyak banyaknya dengan cara persuasif maupun kekerasan. Sebagai contoh, Teuku M. Daud Cumbok dipilih sebagai pimpinan Markas *Uleebalang* karena ia berhasil menguasai banyak senjata Jepang di daerah kekuasaannya Lammeulo.²⁸

Tanggal 25 Oktober 1945 Markas *Uleebalang* melakukan penangkapan dan penahanan atas beberapa pemuda PRI (Pesindo) yang ditugaskan pemerintah daerah untuk menjaga kantor pos dan telepon di Lammeulo. Lebih jauh lagi pada tanggal 8 November 1945, Markas *Uleebalang* melakukan perampasan dan penguasaan rumah pertemuan pemuda pemuda PRI di Lammeulo. Lammeulo pun dibersihkan dari anggota dan pemuka pemuka organisasi perjuangan kemerdekaan. Upaya pemerintah daerah untuk meredam aksi aksi ini dengan cara mengirim utusan ke Markas *Uleebalang* menemui kegagalan bahkan utusan tersebut mendapat perlakuan tak wajar.²⁹ Lammeulo pun dikuasai sepenuhnya oleh Markas *Uleebalang* sehingga mereka pun berencana untuk menduduki kota Sigli.³⁰

Melihat keadaan ini, Jepang pun berusaha mengamankan posisinya dengan cara menciptakan “*balance of power*” di antara golongan-golongan yang saling bersaing di Aceh. Jepang

tentu saja tahu betul bahwa senjata mereka ini menjadi sumber perebutan di antara golongan-golongan di Aceh. Untuk itulah ketika TKR yang merupakan tentara resmi Republik meminta Jepang untuk menyerahkan senjatanya hanya kepada mereka, Jepang menolak dan menjawab bahwa mereka hanya akan menyerahkan persenjataan mereka kepada “rakyat”.³¹

Tentu saja jawaban Jepang tersebut adalah sekadar upaya untuk menolak permintaan TKR. Seperti yang disebut di atas, Jepang memang bermaksud untuk menyerahkan senjata-senjata kepada *uleebalang*. Pada akhir bulan November, Muramoto seorang pembesar Jepang di Sigli menyerahkan selusin senjata secara rahasia kepada Teuku Cut Hasan mantan *gunco* Sigli yang pada saat itu menjabat sebagai bupati Pidie.³² Penyerahan senjata kepada Teuku Cut Hasan ini bukan karena ia adalah bupati Pidie yang mewakili Republik tetapi ia sebagai *uleebalang* yang mendukung gerakan yang dilancarkan Markas *Uleebalang*. Sikap keberpihakan Teuku Cut Hasan kepada Markas *Uleebalang* ini ditunjukkannya ketika ia selaku bupati mengabaikan laporan penduduk di wilayahnya yang menjadi korban latihan militer Markas *Uleebalang* yang menggunakan peluru tajam. Ia juga menggunakan rumah pribadinya sebagai markas pasukan *uleebalang*.³³

Pada akhir November itu juga setelah merasa siap, pasukan *uleebalang* yang terdiri dari kira-kira 200 orang di bawah pimpinan Teuku Pakeh Sulaeman secara diam-diam memasuki kota Sigli dan menggeledah setiap orang yang diduga hendak membantu TKR.³⁴ Tindakan ini menjadikan TKR terpaksa menyingkir sehingga Sigli sepenuhnya berada dalam kendali Markas *Uleebalang*.³⁵

²⁸ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op., Cit.*, h.146

²⁹ *Ibid.*, h.132

³⁰ *Revolusi Desember '45 di Atjeh* h.19

³¹ S.M. Amin., *Op.Cit.*, *Lihat* juga Revolusi Desember '45 di Atjeh, hh.18-19

³² M.Nur El Ibrahimy (2001), *Op.,Cit.*, h.117.*Lihat* juga Nazaruddin Sjamsuddin,*Op.,Cit.*, h.147

³³ *Ibid.*, h.117

³⁴ *Loc.Cit.*,

³⁵ *Ibid.*,*Lihat* juga Amin S.M. *Op.,Cit.*, h.134.

Keadaan bulan Desember ternyata malah semakin genting. Tanggal 1 Desember 1945, tersiar kabar di kalangan *uleebalang-uleebalang* Sigli bahwa Jepang akan menyerahkan senjata. Mendengar itu beberapa *uleebalang* membuat pertahanan dan menjaga ketat setiap masuk menuju Sigli.³⁶ Di lain pihak, ulama PUSA pun segera bereaksi dengan menggerakkan massa ke sekitar daerah Sigli dengan bermarkas di Peukan Pidie di rumah Teuku Raja Husin.³⁷ Massa yang jumlahnya ribuan dan bersenjata ini bergerak ke Sigli sambil menyebut nama nabi dan rasul.³⁸

Ketika keadaan semakin tidak terkendali, datang ke Sigli utusan pemerintah daerah dari Kutaraja yaitu Teuku M. Ali Panglima Polim, Abu Bakar dan Teuku Djohan Meuraksa. Ketika tiba di Peukan Pidie pada tanggal 4 Desember 1945 dini hari, mereka bertemu dengan orang-orang PUSA. Kepada mereka, orang-orang PUSA ini menerangkan bahwa tentara Jepang di Sigli ingin menyerahkan senjata kepada mereka (PUSA) tetapi hal itu dihalang-halangi oleh *uleebalang*. Utusan ini pun kemudian menanyakan akan diapakan senjata rampasan Jepang itu nantinya. Mereka menjawab bahwa senjata itu akan diserahkan kepada pemerintah. Selanjutnya utusan-utusan dari Kutaraja berangkat ke Sigli menemui kelompok *uleebalang* dan bertanya hal yang sama dengan pertanyaan yang diajukan kepada ulama. Ternyata kelompok *uleebalang* di sana menyatakan hal yang bertolak belakang dengan jawaban kelompok ulama bahwa mereka akan menyerahkan senjata kepada pemerintah tetapi dihalangi oleh pihak PUSA.³⁹

³⁶ Teuku M. Ali Panglima Polim, *Sumbangsih Aceh Bagi Republik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) h. 35

³⁷ *Ibid.*, h. 35.

³⁸ S. M. Amin, *Op., Cit.*, h. 134

³⁹ Teuku M. Ali Panglima Polim, *Op., Cit.*, h. 36

Pagi hari tanggal 4 Desember 1945, utusan pemerintah menemui pihak Jepang di Sigli untuk menegosiasikan penyerahan senjata kepada pihak pemerintah Indonesia yang diwakili oleh wakil gubernur Sumatra dan wakil residen Aceh. Dalam pertemuan ini diikuti pula wakil-wakil dari pihak-pihak yang bertikai yaitu dari *uleebalang* dan PUSA. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan antara mereka karena masing-masing pihak akan mengetahui dengan jelas bahwa senjata tersebut akan dikuasai oleh pemerintah. Sementara itu di luar tempat pertemuan, massa telah memasuki kota Sigli yang dikuasai oleh *uleebalang*. Keadaan menjadi semakin mencekam dan menegangkan. Pasukan pemerintah (TKR) yang dipimpin oleh Sjamaun Gaharu mencoba untuk menghentikan gerak maju massa itu dengan memberi tembakan peringatan, tetapi tembakan tersebut justru disalahartikan oleh massa. Massa anti-*uleebalang* mengira tembakan berasal dari kelompok Markas *Uleebalang* yang memberi aba-aba untuk menyerang mereka.

Apa yang terjadi selanjutnya sudah dapat ditebak, massa bukannya mundur tetapi malah maju dan semakin marah. Pertempuran yang berlangsung tiga hari ini pun tidak terhindarkan lagi sehingga menimbulkan korban dari kedua belah pihak.⁴⁰ Pimpinan TKR, Sjamaun Gaharu dituduh berpihak ke kubu *uleebalang* akibat tembakan peringatan itu.⁴¹ Kesepakatan

⁴⁰ Insider, *Op., Cit.* h. 149

⁴¹ Sjamaun Gaharu sebelumnya memang sering dianggap berasal dari golongan *uleebalang* karena meskipun ia keturunan orang biasa, orang tuanya bekerja pada *uleebalang* terkemuka T. Hasan Gelumpang Payong yang pernah menjabat *Gunco* Sigli. *Uleebalang* inilah yang mengirim Sjamaun Gaharu masuk sekolah perwira *Giyugun*. Sjamaun Gaharu pun pernah memakai inisial "T" yang berarti teuku di depan namanya. Lihat Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), h. 31

penyerahan senjata Jepang pun batal oleh peristiwa ini.

Tak lama kemudian datang lagi satu detasemen TKR kiriman Residen Teuku Nyak Arif. Namun tampaknya TKR dan terutama Residen Teuku Nyak Arif sudah tidak dipercaya lagi oleh sebagian rakyat Aceh terutama dari golongan ulama sehingga pasukan ini justeru dilucuti ketika baru sampai di Seulimeum, daerah yang memisahkan Aceh besar dan Pidie.⁴² Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh berpihaknya beberapa orang anggota TKR yang berasal dari golongan *uleebalang* ke dalam Markas *Uleebalang* seperti yang dilakukan letnan Teuku Abdullah.⁴³ Akhirnya Teuku Nyak Arif mengirim pasukan polisi istimewa bersama Teuku Hamid Azwar. Orang yang disebut terakhir ini adalah kepala staf TKR yang juga sepupu Teuku Nyak Arif sendiri.⁴⁴ Di Sigli, Teuku Hamid Azwar mendesak golongan yang bertikai untuk segera menarik pasukannya masing-masing. Permintaan ini disetujui oleh ulama dan *uleebalang*. Mereka mematuhi ini tanpa syarat bahkan pihak *uleebalang* bersedia menyerahkan senjata kepada TKR.

Setelah selesainya pertempuran, massa yang anti *uleebalang* meninggalkan kota Sigli dan pulang ke kampung masing-masing sedangkan *uleebalang-uleebalang* Sigli, Meuredu, dan Lammeulo (semuanya termasuk dalam wilayah Pidie) pada tanggal 10 Desember 1945 berkumpul di rumah Teuku Laksmana Umar di Lueng Putu-Pidie untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya yang berakhir dengan disetujuinya pembentukan pasukan BPK (Barisan Penjaga Keamanan).⁴⁵

BPK dibagi menjadi tiga golongan yaitu Barisan Cap Bintang, Barisan Cap Sauh, dan Barisan Cap Tumbak. Barisan Cap Bintang bertugas memerangi rakyat yang tidak mau tunduk kepada mereka, Barisan Cap sauh bertugas merampok segala harta benda rakyat yang menjadi anggota barisan perjuangan kemerdekaan yang akan dipergunakan untuk biaya barisan ini, dan Barisan Cap Tumbak yang bertugas untuk menangkap orang cerdik-pandai dan menculik gadis-gadis kaum pergerakan.⁴⁶

Sementara itu tanggal 9 Desember 1945, Gubernur Sumatra Teuku Muhammad Hasan datang ke Sigli disertai dua orang asistennya yang salah satunya adalah Xarim M.S ex digulis yang merupakan salah satu tokoh komunis di Sumatra. Kepada Teuku M.Hasan, tokoh-tokoh PUSA melaporkan bahwa Teuku M.Daud adalah orang-orang yang anti-republik. Gubernur Hasan kemudian menindaklanjuti laporan-laporan itu dengan memanggil Teuku M.daud, tetapi *uleebalang* Cumbok itu malah mengirim adiknya Teuku Mahmud yang merupakan salah satu pimpinan BPK. Kepada Teuku Mahmud, Gubernur Hasan menanyakan kebenaran berita-berita yang dilaporkan kepadanya tentang mereka yang tentu saja dibantah olehnya. Tampaknya Gubernur Hasan cukup mempercayai keterangan yang diberikan oleh Teuku Mahmud ini sehingga tidak berusaha melakukan suatu tindakan apa pun terhadap BPK dan Markas *Uleebalang*.⁴⁷ Namun demikian ia menuruti permintaan ulama PUSA untuk memberhentikan bupati Pidie dan residen Aceh dan mengganti bupati Pidie dengan Teuku Cik Muhammad Said yang meskipun

⁴² M.Nur El Ibrahimy (2001), *Op.,Cit.*, h.120

⁴³ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.,Cit.*, h.147.

⁴⁴ Tgk.A.K.Jacobi.*Op.,Cit.*, h.87

⁴⁵ Abdullah Arif, *Op.,Cit.*, h.9

⁴⁶ T.Alibasyah Talsya, *Op.,Cit.*, hh 7-8 Lihat juga transkrip wawancara J.R Chaniago dengan T.M Hasan h.343

⁴⁷Transkrip wawancara J.R Chaniago dengan Teuku M.Hasan h.351

seorang *uleebalang* tetapi dianggap lebih nasionalis. Residen Teuku Nyak Arif sendiri sebelum diberhentikan sudah mengajukan cuti dengan alasan kesehatan yang disetujui oleh Gubernur Hasan yang menunjuk Bupati Aceh Timur Teuku Cik M. Daudsyah sebagai acting residen. Namun begitu Teuku Nyak Arif tetap menjabat sebagai pengawas atau pembina TKR.⁴⁸

Eskalasi ketegangan antara ulama PUSA dan *uleebalang* terutama di Sigli seperti yang telah disebutkan, turut disebabkan oleh Jepang yang “memainkan” politik perimbangan antara kedua belah pihak yaitu dengan menyokong pihak yang kurang kuat (*uleebalang*). Patut diperhitungkan juga pengaruh komunis yang dimainkan oleh Nathar Zainuddin dan kemudian Xarim M.S yang aktif membuat intrik-intrik kepada kelompok ulama dan *uleebalang* untuk memperebutkan senjata Jepang sehingga mungkin sekali dua tokoh ini memberikan informasi-informasi yang saling bertentangan kepada dua belah pihak. Xarim M.S misalnya memeralat Djohan Ahmad, wartawan majalah terbitan Medan *Seruan Kita* sebagai agitator.⁴⁹ Xarim M.S. pun melaporkan kepada Gubernur Hasan bahwa Teuku M. Daud telah menolak mengucapkan kata “merdeka” dan malah menyebut kata “merdiki”. Mungkin saja ini cuma upaya Xarim M.S untuk memprovokasi gubernur karena sebagai orang yang berhaluan dan aktif dalam kegiatan komunis, tentunya ia tidak suka dengan golongan *uleebalang* yang merupakan “*the upper class*” dan golongan feodal dalam masyarakat Aceh.

Tindakan destruktif *uleebalang* ini terus berlangsung dan semakin meningkat selama bulan Desember itu. Tanggal 16 Desember, BPK

⁴⁸ Nazaruddin Sjamsuddin, *Op. Cit.*, hh.150-153

⁴⁹ *Ibid.*, h.158

menyerang Metareum yang berjarak 7 km dari Lammeulo yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi penduduk setempat.⁵⁰ Penduduk pun kemudian mengadakan perbuatan *uleebalang* ini kepada Bupati Pidie Teuku Cik Muhammad Said tetapi kemudian setelah bertemu dengan Teuku Daud Cumbok, ia hanya menyarankan agar rakyat Metareum untuk tidak mengambil tindakan apa pun karena *uleebalang* Cumbok tidak sengaja menyerang Metareum dan serangan yang dilakukan *uleebalang* tersebut hanyalah latihan belaka.⁵¹ Tentu saja rakyat Pidie yang menjadi korban dan seterusnya golongan ulama pun kehilangan kesabaran apalagi melihat sikap pemerintah daerah yang tampak tidak responsif sehingga pada tanggal 22 Desember 1945, di Garot Pidie berdiri Markas Besar Rakyat Umum.⁵²

Terpilih sebagai ketua MBRU adalah Hasan Ali ketua Pesindo cabang Sigli sedangkan anggota anggotanya adalah ulama ulama dan pemuda pemuda dari seluruh Pidie. Duduk sebagai panglima perang adalah Teungku Umar Tiro yang merupakan cucu pahlawan Teungku Cik di Tiro, sedangkan terpilih sebagai penasihat adalah T.M Amin (bendahara PUSA) dan Teungku H. Mustafa.⁵³ Selain di Garot, MBRU juga didirikan di daerah Pidie lain seperti di Metareum, Le Leubeu, dan Gigieng. MBRU memang disiapkan untuk melakukan serangan balasan terhadap Markas *Uleebalang* sehingga ketika dirasa telah siap yaitu pada dini hari 25 Desember 1945, dilancarkanlah suatu serangan mendadak ke kubu Markas *Uleebalang*.⁵⁴

⁵⁰ Abdullah Arif, *Op. Cit.*, h. 14

⁵¹ *Ibid.*, h. 15

⁵² *Revolusi Desember '45 di Atjeh*, h. 26. Lihat juga *Ibid.*, h. 17

⁵³ Abdullah Arif, *Loc. Cit.*,

⁵⁴ *Ibid.*,

Pihak *uleebalang* agaknya cukup terkejut dengan serangan mendadak ini, tetapi hal tersebut justru membuat Markas *Uleebalang* makin meningkatkan serangannya. Pada tanggal 30 Desember mereka mengadakan serangan balasan dengan menggunakan meriam dan senapan mesin dan biasa di Kampung Langga suatu mukim di Pidie yang dilanjutkan dengan penyerangan ke Metareum Pidie pada keesokan harinya sehingga semua rumah di daerah itu dilaporkan menjadi abu. Pembakaran pembakaran yang ditakukan Markas *Uleebalang* berdasarkan petunjuk *uleebalang uleebalang* setempat seperti yang dilakukan *uleebalang* Metareum yang menunjuki rumah rumah anggota Pesindo dan TKR kepada pasukan Markas *Uleebalang* (BPK) yang kemudian membakarnya.⁵⁵

Sementara kekacauan kekacauan semakin meningkat di Pidie, tidak tampak juga suatu upaya yang berarti yang dilakukan pemerintah daerah yang karena berada di luar daerah Pidie, mungkin menganggap berita itu cuma dibesar besarkan saja oleh pihak ulama. Pada saat itu pemerintah memilih untuk lebih mengkonsentrasikan diri pada kemungkinan serangan Belanda dari Sabang dan juga Jepang. Belanda tiba di Sabang sejak Agustus 1945 untuk memulangkan para buruh yang telah diangkut ke pulau itu oleh pihak Jepang.⁵⁶ Tersiar pula kabar bahwa pada bulan Oktober pasukan sekutu termasuk dari Belanda telah sampai di Sumatra sedangkan pada tanggal 24 Desember, 2 batalyon pasukan Jepang yang telah menyerah pada sekutu telah diperintahkan sekutu untuk kembali ke Aceh. Berita akan kembalinya Belanda ke Aceh sangat santer di Aceh pada bulan November

dan Desember 1945 sehingga tak heran ketika rakyat Sigli mendengar berita akan mendaratnya pasukan Belanda di Sigli tanggal 25 Desember 1945, langsung berjaga-jaga di sekitar pantai di Sigli untuk menghadang.

Di Kutaraja, perlu waktu dan upaya keras dari Teungku M. Daud Beureueh untuk meyakinkan peserta sidang Komite Nasional Daerah tentang parahnya situasi Pidie, sehingga baru pada awal Januari 1946, Komite Nasional Daerah Aceh memutuskan untuk mengirim sebuah panitia *ad hoc* ke Pidie. Panitia *ad hoc* terdiri dari M. Daud Beureueh (PUSA), T.M. Amin (PUSA), Ismail Jacob (PNI/PUSA), H. Hasan Krueng Kalee (ulama non PUSA), dan Teuku Ali Lamlagang (Pejabat pemerintah/*uleebalang*).⁵⁷

Pada bulan Januari, semua pihak telah menyadari gentingnya keadaan di Pidie sehingga Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakjat (MUPPR) yang baru saja dibentuk sebulan sebelum itu langsung membahas tentang situasi Pidie dalam sidang pertamanya.⁵⁸ Dalam rapat itu akhirnya diputuskan bahwa kaum *uleebalang* yang terlibat dalam BPK adalah penghianat tanah air. Keputusan ini kemudian diperkuat lagi dengan keputusan rapat tanggal 8 Januari 1946 yang dengan suara bulat mengeluarkan keputusan untuk memberikan ultimatum yang berisi perintah kepada golongan yang berpusat di Lammeulo Pidie (*uleebalang*) untuk menyerah dan menghentikan perlawanannya mulai hari Kamis 10 Januari 1946, pukul 12 siang.⁵⁹

Sementara itu, sehubungan dengan instruksi Teungku M. Daud Beureueh untuk memperkuat barisan di Pidie maka barisan barisan

⁵⁵ *Revolusi Desember '45*, h. 26. Lihat juga *Ibid.*, hh. 16-17.

⁵⁶ M.C Riclefs. *Sejarah Indonesia Modern*. hh. 324-330.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 166

⁵⁸ MUPPR dibentuk pada bulan Desember 1945 di Kutaraja dengan maksud untuk mengkoordinasikan semua kegiatan militer di Aceh. Lihat *ibid.*, hh 167-168.

⁵⁹ T.M Ali Panglima Polim, *Op., Cit.*, h.43.

bersenjata dan rakyat pro ulama dari Bireun (daerah yang terletak antara Lhokseumawe dan Sigli) siap berangkat ke Pidie untuk menghadapi pasukan Cumbok. Maka terjadilah iring iringan besar yang terdiri dari barisan bersenjata dan rakyat yang jumlahnya mencapai 1000 orang dengan senjata yang jumlahnya kurang lebih 100 pucuk termasuk beberapa senapan mesin ringan dan satu senapan mesin berat dari Samalanga Aceh Utara.⁶⁰ Sebelum berangkat MBRU mengeluarkan maklumat yang berisi larangan untuk membakar rumah, mengambil harta, memukul musuh yang sudah ditawan, dan himbuan untuk memperlakukan tawanan dengan baik.⁶¹

Pada tanggal 6 Januari 1946, iring iringan massa tersebut berangkat dari Bireun menuju Sigli dengan melewati Meureudu, Lueng Putu, Teupin Raya, hingga akhirnya mencapai Beureunun pada tanggal 11 Januari yang berarti tinggal selangkah lagi bagi mereka untuk memasuki benteng pertahanan Markas *Uleebalang* di Lammeulo. Di sepanjang perjalanan iring iringan ini melakukan serangan terhadap golongan *uleebalang* setempat yang telah membuat pertahanan kecuali di Meureudu karena sudah diserang sebelumnya dan Teupin Raya yang dapat dimasuki tanpa perlawanan *uleebalang*nya.⁶²

Pada tanggal 12 Januari 1946, belum ada juga tanda tanda *uleebalang* dari Lammeulo untuk menyerah. Maka digempurlah kota itu dari berbagai jurusan. Dari arah Metareum menyerang barisan dari Seulimeum Aceh Besar Yang membawa meriam, dari arah Beureneun menyerang pasukan TKR bersama polisi istimewa dan rakyat

dari Aceh Utara, sedangkan dari arah Titeu menyerang barisan dari Tangse dan Peudaya.⁶³ *uleebalang uleebalang* ini agaknya menyangka bahwa mereka lebih unggul dari seterusnya karena memiliki senjata Yang lebih banyak sehingga mereka tidak mengindahkan ultimatum yang diberikan kepada mereka. Namun bagaimana pun jumlah pasukan lebih menentukan di sini sehingga dengan cepat pasukan *uleebalang* menjadi terdesak, apalagi pasukan ulama dilengkapi juga dengan sebuah meriam howitzer (meriam gunung) Yang berhasil didatangkan dari Kutaraja.⁶⁴ Bagi kedua belah pihak keadaannya ketika itu adalah “*to be or not to be*” sehingga maklumat Yang dikeluarkan MBRU pun tidak dapat diharapkan akan dipatuhi di lapangan karena demikian banyak orang yang terlibat dengan tentunya didorong oleh motivasi yang berbeda beda, misalnya untuk balas dendam. Sebagai contoh, seorang Jawa bernama Ahmad yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan *uleebalang* atau pun pihak lawannya turut pula menjadi korban dalam peristiwa itu karena kernungkinan ada yang menaruh dendam kepadanya sehubungan pekerjaannya sebagai pegawai kereta api yang sering menghalangi penyelundupan.⁶⁵

Setelah terjadi pertempuran yang sengit selama dua hari, benteng kubu *uleebalang* di Cumbok pun dapat dikalahkan, sehingga pada tanggal 13 Januari 1946 pasukan ulama dapat memasuki kota Lammeulo. Digambarkan bahwa Markas *Ueebalang* yang berkedudukan di rumah Teuku M. Daud Cumbok sudah dalam keadaan hancur berantakan dan empu rumah

⁶⁰ M. Nur El Ibrahimy (200 1), Op. Cit, h. 128.

⁶¹ Abdullah Arif, Op. Cit., h. 20.

⁶² M. Nur El Ibrahimy, Loc. Cit,

⁶³ Abdullah Arif, Op. Cit., h. 22

⁶⁴ M. Nur El Ibrahimy, Loc. Cit.,

⁶⁵ Wawancara dengan M. Nur El Ibrahimy, Jakarta 3 April 2002.

itu sendiri sudah melarikan diri. Pada tanggal 16 Januari 1946, Teuku Daud Cumbok dan pengawalnya ditangkap, di Gunung Seulawah Agam. Setelah penangkapan ini Markas Besar Rakyat Umum mengeluarkan maklumat yang menyatakan pertempuran telah selesai.⁶⁶ Maklumat ini kemudian diikuti pula dengan sebuah Maklumat Penjelasan pada tanggal 17 Januari 1946 yang antara lain berisi bahwa pertempuran yang terjadi di Sigli Lammeulo Meureudu dari tanggal 22 Desember 1945 sampai 13 Januari 1946 adalah peperangan dan pertempuran antara pihak rakyat umum dari Negara Republik Indonesia dengan pihak penghianat negara.⁶⁷ Dengan dikeluarkannya Maklumat dan Maklumat Penjelasan ini, makin kuatlah legitimasi ulama sebagai pihak pemenang. Sebaliknya bagi pihak yang kalah, hukuman pun telah menanti sesuai dengan besar kecilnya keterlibatan mereka dalam Markas *Uleebalang*. Menurut perkiraan kasar dalam sebuah penelitian, jumlah *uleebalang* yang terbunuh dalam Perang Cumbok ini adalah 98 orang.⁶⁸

Gerakan TPR

Perang Cumbok yang telah menyebabkan tersingkirnya golongan *uleebalang* dari kekuasaan, ternyata hanya merupakan prolog dari serangkaian peristiwa yang akan mengikutinya. Setelah Perang Cumbok, sebagian dari unsur radikal dalam tubuh ulama PUSA seperti Amir Husin Al Mujahid, merasa kecewa karena ternyata masih banyak bangsawan yang menjadi bupati atau wedana di luar Pidie.⁶⁹ Golongan radikal ini menganggap bahwa penghancuran golongan *uleebalang* di

Pidie dan sernua perubahan yang mengikutinya belumlah cukup sampai seluruh orang yang dianggap sebagai “sisa sisa *uleebalang*” hilang dari seluruh Aceh.⁷⁰ Untuk itu, pada awal Februari 1946, Amir Husin Al Mujahid membentuk Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) di Idi Aceh Timur.⁷¹ Sosok Amir Husin Al Mujahid ini menarik untuk dicermati. Al Mujahid tadinya adalah seorang santri muda yang mengawali karirnya sebagai ketua Pemuda PUSA setelah menjadi satu satunya orang yang mencalonkan diri sebagai ketuanya dan menambah kata “Al Mujahid” yang artinya pejuang pada namanya sendiri yang merupakan suatu hal yang tak lazim dilakukan orang pada masa itu.⁷²

TPR meskipun dipimpin oleh anggota PUSA tetapi longgar dalam perekrutan anggotanya maupun anggarannya karena memang untuk mencapai tujuannya “menumpas sisa sisa *uleebalang*”, TPR membutuhkan dukungan pasukan yang besar. Untuk itu TPR menerima siapa saja yang ingin bergabung dengan mereka tanpa memeriksa terlebih dahulu latar belakang dan motivasi mereka untuk bergabung dengan TPR.

TPR mengawali gerakannya dari Aceh Timur pada tanggal 22 Februari 1946, dengan menyingkirkan Asisten Residen (Bupati) Aceh Timur Teuku Raja Pidie, Wedana Langsa Teuku All Basyah, dan Teuku M. Arifin dari Kuala Simpang. Sebagai pengganti pejabat pejabat ini TPR menempatkan Abdullah Hussain sebagai wedana Langsa dan ironisnya seorang *uleebalang* lain yaitu Teuku Ali sebagai Bupati Aceh Timur.

Melihat tujuan didirikannya TPR yang ingin menumpas sisa sisa *uleebalang*, timbul pertanyaan, mengapa setelah menyingkirkan

⁶⁶ S. M. Arnin, *Op. Cit.*, hh. 138-139

⁶⁷ *Ibid.*, h. 13-9

⁶⁸ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hh. 140-141

⁶⁹ Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik*, (Jakarta: Grafiti Press, 1990), h. 27.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Nazaruddin Sjamsuddin (1998), *Op. Cit.*, h. 36

Asisten Residen Teuku Raja Pidie, mereka mengangkat *uleebalang* lainnya yaitu Teuku Ali sebagai asisten residen Aceh Timur? Tampaknya “pembasmian sisa sisa *uleebalang*” bukanlah satu satunya faktor karena terdapat pula faktor *like and dislike* di dalamnya yang menjurus pada penyingkiran tokoh tokoh yang dianggap kontra ulama PUSA. Untuk itulah Teuku Ali yang merupakan adik dari Akting Residen Teuku M. Daudsyah yang pro PUSA diangkat sebagai asisten residen Aceh Timur karena ia dianggap akan lebih kooperatif terhadap kepentingan PUSA.

Setelah Aceh Timur, pasukan TPR terus menuju utara menuju Lhokseumawe hingga akhirnya sampai di Seulimeum yang berjarak hanya kurang lebih 40 km saja dari pusat ibukota Kutaraja pada tanggal 1 Maret 1946. Disepanjang *Long March* yang berkekuatan kurang lebih 50 truk ini, TPR menangkapi seluruh *uleebalang* di Idi, dan hampir seluruh *uleebalang* di Lhokseumawe, sedang di Pidie tidak ada *uleebalang* yang ditangkap karena hampir seluruhnya terbunuh dalam Perang Cumbok kecuali Teuku Bentara Pineung Ibrahim dan Teuku Ali Basyah.⁷³

Menanggapi gerakan TPR ini tampaknya pemerintah Kutaraja tidak dapat berbuat banyak. Sebenarnya Komandan TRI Aceh Sjamaun Gaharu akan menginstruksikan komandan Seulimeum untuk menahan gerak maju pasukan TPR ke Kutaraja. Tetapi instruksi itu tidak dapat dilakukan karena telepon terputus. Selanjutnya diadakan serangkaian pertemuan di antara pimpinan pemerintah daerah di Kutaraja yang mayoritas merekomendasikan agar gerakan TPR tersebut ditumpas. Namun Residen Teuku Nyak Arif dalam kapasitasnya

sebagai anggota Staf Umum TRI Komandemen Sumatra (Teuku Nyak Arif ketika itu berstatus cuti dari jabatan residen), menginstruksikan penyelesaian secara damai.⁷⁴

Dengan demikian tidak ada halangan bagi TPR untuk memasuki Kutaraja.⁷⁵ Selanjutnya pimpinan TPR diundang ke Markas Divisi V TRI.⁷⁶ Pada tanggal 1 Maret 1946 terjadi pertemuan antara tokoh tokoh TPR dan TRI. Tokoh--tokoh TPR yang hadir kebanyakan berasal dari tokoh tokoh Pemuda PUSA dan Pesindo, antara lain: Amir Husin Al Mujahid, A. Gani Usman, M. Nur El Ibrahimy, Nyak Neh Lhok Nga, dan Sjech Marhaban. Divisi V TRI diwakili oleh Sjamaun Gaharu, T. Hamid Azwar, dan beberapa staf lainnya. Ikut pula dalam pertemuan tersebut Wakil Residen M. Ali Panglima Polim yang bertindak sebagai wakil pemerintah.⁷⁷ Dalam pertemuan itu sekali lagi secara resmi dikemukakan keinginan TPR untuk mengambil kekuasaan militer dari TRI. Namun Komandan Divisi V Sjamaun Gaharu meminta waktu

⁷⁴ *Ibid.*, hh 249-251

⁷⁵ Sebelum sampai di Kutaraja yaitu ketika tiba di Sigli, Husin Al Mujahid dalam sebuah dialog dengan M. Nur El Ibrahimy, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, dan Ayah Gani (Abdul Gani Usman), menegaskan bahwa tujuannya ke Kutaraja adalah untuk menurunkan T. Nyak Arif dan Sjamaun Gaharu dari jabatannya karena rasa tak percaya kepada keduanya. Ketiga orang ini kemudian menyarankan Al Mujahid untuk terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuan TPR kepada teman seperjuangan di Kutaraja dan mengusahakan jalan damai tanpa pertumpahan darah. Usul tersebut diterima dan sebagai tindak lanjutnya dikirimkanlah satu utusan ke Kutaraja yaitu tiga orang pengusul tadi, untuk menyampaikan maksud dan tujuan TPR kepada teman seperjuangan mereka di Kutaraja serta untuk berunding dengan TRI *Lihat*, M. Nur El Ibrahimy. *Op. Cit.*, hh. 142-143.

⁷⁶ *Ibid.*, 253, Malam sebelumnya telah terjadi pertemuan di Blang Padang Kutaraja antara utusan TPR (M. Nur El Ibrahimy, Tgk. Abdul Wahab Seuhmeurn, dan Ayah Gani), utusan TRI Husin Jusuf, serta tokoh tokoh PUSA dari Aceh Besar yaitu Nyak Neh, Ali Hasymi, dan Sjech Marhaban. Hasil pertemuan ialah Residen T. Nyak Arif, Komandan Divisi V Sjamaun Gaharu, dan T. Hamid Azwar tidak akan mengambil tindakan perlawanan untuk menghindari pertumpahan darah. Penulis tidak mengetahui mengapa dari pihak TRI diutus Wakil Komandan Divisi V Husin Jusuf? Apakah hal ini sepengetahuan atasannya Sjamaun Gaharu? Ada kesan pertemuan ini cuma membawa satu suara yaitu TPR atau PUSA karena Husin Jusuf adalah perwira yang berorientasi ke PUSA. Husin Jusuf dikemudian hari ikut dalam *DI/TII*. *Lihat Ibid.*, 143 dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Op. Cit.*, 101

⁷⁷ Nazaruddin Sjamsuddin (1998), *Op. Cit.*, h. 187

⁷³ Ramadhan KH, Hamid Jabbar, *Op., Cit.*, h.248

untuk membicarakan hal tersebut dengan Teuku Nyak Arif sebagai Staf Umum Komandemen Sumatra.⁷⁸ Sjamaun Gaharu melaporkan hasil pertemuan itu kepada atasannya Teuku Nyak Arif seraya memberitahukannya bahwa Resimen I berada dalam keadaan siap siaga menunggu perintah,⁷⁹ suatu sinyal bagi Arif bahwa tentara menginginkan penyelesaian dengan cara militer. Namun Teuku Nyak Arif memilih untuk tetap mengikuti kemauan TPR.⁸⁰ Teuku Nyak Arif yang mempunyai reputasi sebagai orang yang berani dan terkenal luas sebagai “rencong Aceh” tidak punya pilihan lain selain menuruti saja kemauan Al Mujahid dari anggota TPR lainnya. Teuku Nyak Arif tentu menyadari bahwa sejak Perang Cumbok berakhir, secara *de facto* kekuasaan telah berpindah kepada golongan ulama sehingga meskipun secara matematis kekuatan pasukan peminintah lebih besar dan lebih terlatih, tidak akan menghalangi mereka untuk segera merebut kekuasaan.⁸¹ Selain itu Teuku Nyak Arif yang tengah menderita penyakit diabetes akut ini tentu ingin menghindari perang saudara yang lebih besar lagi karena meski kekuatan TPR tak terlatih dan kurang senjata, tidak tertutup kemungkinan TPR akan memobilisasi rakyat sipil yang dengan mudah digerakkan atas nama “membersihkan sisa sisa *uleebalang*. Teuku Nyak Arif sendiri pada awalnya tampaknya tidak menduga bahwa kedudukannya juga terancam karena walaupun ia secara

⁷⁹ Rarnadhan K.H, Hamid Jabbar, *Op. Cit.*, h. 255.

⁸⁰ Berita yang dibawa Sjamaun Gaharu ini sebenarnya telah diketahui oleh T. Nyak Arif sehari sebelumnya yaitu 28 Februari 1946 lewat Wakil Residen T. M. Ali Panglima Polim. Dalam pertemuan antara keduanya tersebut, T. Nyak Arif mengemukakan kesediaannya untuk memenuhi tuntutan Al Mujahid. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin (1998), *Op. Cit.*, hh. 186 187.

⁸¹ Pasukan Divisi V TRI terdiri dari 2 batalyon, 150 orang polisi istimewa, 150 polisi tentara, 200 orang staf resimen, 300 orang pasukan dari batalyon I/resimen I yang semuanya terlatih. TPR terdiri dari 1000 orang sipil dari Idi Aceh Timur dan 1000 orang Pesindo yang tak terlatih. Lihat Ramadhan K. H. Hamid Jabbar, *Ibid.*, h. 250.

genetis termasuk dalam golongan *uleebalang* tetapi ia “dekat ‘ dengan pihak ulama termasuk ulama PUSA. Pada hari itu juga terjadi serah terima jabatan. Teuku Nyak Arif membuka sendiri tanda pangkat Sjamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar yang kemudian sesuai dengan permintaan, diserahkan kepada Panglima TPR Amir Husin Al Mujahid.⁸² Setelah Amir Husin Al Mujahid memberhentikan Sjamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar, pada tanggal 12 Maret 1946, diadakanlah rapat pimpinan TPR yang kemudian menetapkan nama yang disebut pertama sebagai anggota staf umum TRI Komandemen Sumatra di Aceh menggantikan Teuku Nyak Arif dengan pangkat jenderal mayor.⁸³ Kemudian ditetapkan pula pengganti Sjamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar yang semuanya tercantum dalam Maklumat TRI No. 4 tanggal 12 Maret 1946.⁸⁴

Tidak cukup dengan pengambilalihan kekuasaan militer, Al Mujahid juga menuntut Teuku Nyak Arif mundur dari jabatan residen untuk digantikan oleh Akting Residen Teuku Daudsyah, begitu juga dengan jabatan Bupati Aceh Besar Teuku Husin Teureumon yang kemudian digantikan oleh tokoh muda PUSA Zaini Bakri. Namun begitu, Al Mujahid tidak menuntut jabatan wakil residen dari Teuku M. Ali Panglima Polim yang disebabkan eratnyanya tokoh yang disebut terakhir itu dengan PUSA.⁸⁵

Dengan keadaan ini tampaknya menjadi mudah saja bagi TPR dan PUSA untuk mengendalikan keadaan. Tak lama kemudian, Akting Residen Teuku Daudsyah yang pro PUSA, memanggil 24 tokoh sipil dan militer di antaranya Sjamaun Gaharu, Hamid

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Nazaruddin Sjamsuddin (1998), *Op. Cit.*, h. 188

⁸⁴ Rarnadhan K.H, Hamid Jabbar, *Op. Cit.*, h. 258.

⁸⁵ Nazaruddin Sjamsuddin (1998), *Op. Cit.*, h. 189.

Azwar, Sayid Ali, Sayid Usman, M. Syah, Teuku Hamdani, Teungku Hasbi As Shiddiqi, Teuku M. Yusuf, dan Teuku T. Hanafiah. Teuku Nyak Arif sendiri tidak hadir dalam pertemuan itu karena telah dibawa ke Takengon Aceh Tengah dan ditahan di sana. Pertemuan itu dihadiri pula oleh Teuku M. Amin dan Sayid Umar tokoh PUSA, sehingga sulit mengabaikan keterlibatan PUSA di dalamnya. Ke 24 orang ini akhirnya dibawa pula ke Takengon bersama sama *uleebalang* *uleebalang* dan orang-orang yang dianggap sisa-sisa *uleebalang* yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh Amir Husin Al Mujahid yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang, 60 orang di antaranya adalah *uleebalang* dan keluarga dekat mereka.⁸⁶

Setelah mengambil kekuasaan di ibukota Kutaraja, pasukan TPR membentuk kesatuan ekspedisi dan mengirimkannya ke Pantai Barat (Aceh Barat) pada minggu terakhir Maret 1946. Di sana *uleebalang* setempat seperti Teuku R. Iskandar dan Teuku Hitam Patek diturunkan dan jabatannya untuk kemudian dibawa ke Kutaraja dan dijatuhi hukuman eksekusi.⁸⁷ Tindakan serupa terjadi pula di Gayo Aceh Tengah sehingga pada akhir Maret 1946, seluruh *uleebalang* di Aceh telah diturunkan atau dibunuh kecuali beberapa orang *uleebalang* yang dianggap kooperatif seperti Teuku Cik M. Daudsyah dan Teuku M. Ali Panglima Polim ataupun mereka yang berhasil melarikan diri ke Medan atau Sabang yang berada dalam kontrol Belanda.

Kesimpulan

Kekalahan Jepang menimbulkan suasana ketidakpastian. Terdapat tanda-tanda akan munculnya kembali

⁸⁶ *Ibid.*, h.190

⁸⁷ M. Isa Sulaiman. *Op. Cit.*, h. 154

kekuasaan Belanda ke Aceh. Kedatangan Belanda rupanya diharapkan oleh kebanyakan kaum *uleebalang* yang pernah mengecap keuntungan dari penjajah Belanda. Namun sebaliknya menimbulkan kegelisahan terutama bagi kalangan ulama (baca:PUSA) yang melihat kedatangan kembali Belanda sebagai ancaman.

Di tengah ketidakpastian dan kegelisahan itulah tersiar kabar telah diproklamasikan Negara Republik Indonesia. Berdirinya negara ini seakan menjadi jalan keluar bagi golongan ulama yang segera menyatakan dukungannya sebaliknya bagi kebanyakan golongan *uleebalang* berdirinya Negara Republik Indonesia merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas internasional ketika itu.

Pendirian yang bertentangan di antara dua elite lokal tersebut mencapai klimaks dengan meletusnya Perang Cumbok di Pidie (Desember 1945-Januari 1946). Pihak *uleebalang* Pidie akhirnya kalah dan tersingkir dari kekuasaannya. Tidak cukup di Pidie saja, beberapa bulan setelah berakhirnya Perang Cumbok, terbentuk Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) yang ingin menyingkirkan *uleebalang* di seluruh Aceh. Kebanyakan *uleebalang* di Aceh pun mengalami nasib yang sama dengan rekan mereka di Pidie. Golongan ulama pun mengambil alih kekuasaan di bawah naungan Republik.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip/Dokumen

ANRI, *Koleksi Transkrip Sejarah Lisan (Has.81.A.V.01-02)* Hasan, Teuku Muhammad oleh J.R Chaniago, 40 kaset (transkrip), 1981

Buku-Buku dan Karya Lainnya
Amin SM. *Kenangan-Kenangan dari Masa Lampau,*

- Jakarta:Pradnya
Paramita,1978.
- Anderson, Ben. *Revoloesi
Pemoeda:Pendudukan Jepang
dan Perlawanan di Jawa
1944-1946*, Jakarta:Pustaka
Sinar Harapan, 1988.
- Arif, Abdullah. *Disekitar Peristiwa
Penghianat Tjumbok,
Kutaraja:Semangat Merdeka,
tt*
-
- Bingkisan Kenang-Kenangan
Kongres Besar PUSA dan
Pemuda PUSA,
Kutaraja:Panitia Raja Kongres
Besar PUSA, 1950.*
- El Ibrahimy, M. Nur Haji. *Teungku
M. Daud
Beureueh:Peranannya Dalam
Pergolakan Aceh*, Jakarta:
Media Dakwah, 2001.
-
- Mata Rantai yang hilang dari
Sejarah Perjuangan Indonesia
di Aceh*, Jakarta:Grasindo,
1996
- Insider. *Atjeh Sepintas Lalu*,
Jakarta:Balai Pustaka,1990.
- Jacobi, AK. *Aceh Dalam Perang
Mempertahankan Proklamasi
Kemerdekaan 1945-1949: dan
Peranan Teuku Hamid Azwar
sebagai Pejuang*,
Jakarta:Gramedia Pustaka
Utama, 1998
- Jacoeb, Ismail. *Bertebaranya Bendera
Islam di Tanah Atjeh*,
Kutaraja:Panitia Kongres
PUSA ke-1,tt.
- Panglima Polem, T.M.Ali.
*Sumbangsih Aceh Bagi
Republik*, Jakarta:Pustaka
Sinar Harapan, 1996
- Ramadhan KH dan Hamid Jabbar.
*Sjamaun Gaharu:Cuplikan
Perjuangan di daerah Modal*,
Jakarta:Pustaka Sinar
Harapan,1995.

*Revolusi Desember'45 di Atjeh atau
Pembasmian Penghianat
Tanah Air,
Kutaradja:Pemerintah RI,tt*
Riclefs, MC. *Sejarah Indonesia
Modern.* Yogyakarta:UGM
Press,1998



Saleh, Hasan. *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1990

Sjamsuddin, Nazaruddin.
*Pemberontakan Kaum
Republik:Kasus Darul Islam
Aceh*, Jakarta:Pustaka Utama
Grafiti, 1990.

*Revolusi di Serambi
Mekah:Perjuangan
Kemerdekaan dan
Pertarungan Politik di Aceh
1945-1949*, Jakarta:UI Press,
1998.

Sulaiman, Isa.*Sejarah Aceh:Sebuah
Gugatan Terhadap Tradisi*,
Jakarta:Pustaka Sinar
Harapan, 1991.

Talsya, Teuku Alibasyah.*Sedjarah
dan Dokumen-Dokumen
Pemberontakan di
Atjeh*,Jakarta:Penerbit
Kesuma, tt

Wawancara
M. Nur El Ibrahimy
4 Juni 2001 dan 3 April 2003
di Jakarta